

Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada Tahun 2019

Thessalonica Fahra Williams¹, Rahmah Daniah²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (surel: lony.william@gmail.com)

²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

The economic relations that Indonesia and South Korea have established become a strong reason why both countries agreed to take their cooperation into the next level. Thus, Indonesia and South Korea agreed to enhance their economic relations through an intensified agreement: IK-CEPA, or, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. However, ever since the first rounds of negotiation started in 2012, both countries have yet to reach a consensus on the establishment of the agreement. Thus making the negotiation processes halted. The factors that influence the termination of this agreement are mainly caused by the difference of stake & interest. It is then after 4 years, in 2019, the reactivation of this agreement is agreed upon. Both countries continued the negotiation rounds and signed the agreement in 2020. This research aims to find out why both countries decided to reactivate the negotiation process using the theory of Two Level Games by Robert Putnam. Based on the analysis, it is then found that both countries have overlapping interests in this agreement that are mutually beneficial. Using the win-set concept, the overlapping interest was found through the Two Levels: International and Domestic Level in Korea and Indonesia. This research analyzed the overlapping interest in Level II: Preferences and Coalitions & Political Institution, and Level I: Negotiation Strategy.

Keywords: IK-CEPA, Two Level Games, Economic Partnership, Negotiation Process

ABSTRAK

Hubungan ekonomi yang telah terjalin antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi salah satu alasan kuat mengapa kedua negara tersebut sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonominya melalui perjanjian yang lebih intensif, yaitu IK-CEPA, atau *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Namun, sejak putaran pertama perundingan yang dimulai pada 2012, kedua negara belum juga mencapai kesepakatan

mengenai pembentukan *agreement* ini, yang membuat proses perundingan terhenti. Faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya perjanjian ini disebabkan oleh adanya perbedaan *stake & interest*. Barulah pada tahun 2019, 4 tahun setelahnya, reaktivasi perjanjian ini disepakati. Kedua negara pun melanjutkan putaran negosiasi dan menandatangani kesepakatan tersebut pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kedua negara memutuskan untuk melakukan reaktivasi perundingan dengan menggunakan teori *Two Level Games* oleh Robert Putnam. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa di dalam perjanjian ini, kedua negara memiliki kepentingan yang saling tumpang-tindih namun juga saling menguntungkan. Dengan menggunakan konsep *win-set*, kepentingan yang *overlapping* tersebut ditemukan melalui Dua Level: Level Internasional dan Level Domestik di Korea Selatan dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis *overlapping interest* pada Level II: Preferensi dan Koalisi; dan Institusi Politik, dan Level I: Strategi Negosiasi.

Kata Kunci: *IK-CEPA, Two Level Games, Kerjasama Ekonomi, Proses Perundingan.*

PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia umumnya melakukan kerjasama ekonomi untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan domestiknya. Kerjasama ini umumnya dibakukan ke dalam berbagai bentuk perjanjian, salah satunya adalah *Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CEPA)*. Kerangka kerjasama ini mencakup kesepakatan kerjasama ekonomi terintegrasi tertinggi, yang mengatur mengenai perjanjian barang dan jasa, investasi, *mutual recognition*, *e-commerce*, kekayaan intelektual, *capacity building*, dan lainnya (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). CEPA memiliki intensitas perjanjian yang lebih kompleks dan mengatur *scope* yang lebih luas dengan berbagai preferensi dan *benefit* yang lebih beragam dari jenis kerangka perjanjian ekonomi lainnya (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Pada umumnya, perjanjian CEPA diinisiasikan oleh dua negara yang telah memiliki kedekatan diplomatik dan hubungan perdagangan yang sangat baik. Oleh karena itu, Indonesia dan Korea Selatan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat, kemudian menginisiasikan pembentukan perjanjian ini. Diawali dengan pembentukan *joint feasibility study* antara kedua negara

pada tahun 2011, *study group* tersebut ditujukan untuk memastikan kelancaran kerjasama ekonomi kedua negara dengan saling menguntungkan. Hasil analisis yang mencakup pembahasan mengenai spesifikasi proyek-proyek kerjasama ekonomi sesuai dengan ahli dibidangnya tersebut menemukan bahwa perjanjian CEPA akan mampu memfasilitasi hubungan kedua negara tersebut dengan lebih baik. Temuan inilah yang kemudian berperan sebagai dasar lanjutnya proses perundingan IK-CEPA yang dimulai pada tahun 2012.

Di tengah jalannya perundingan IK-CEPA, tahapan perundingan sempat dihentikan sementara karena adanya perbedaan *stake* kepentingan kedua negara yang tidak memperoleh titik temu. Ketidaksepakatan dan ketidakanggapan pemenuhan permintaan satu sama lain terjadi dalam pengajuan *benefit* yang diusung masing-masing negara menjadi permasalahan yang tidak diterima oleh kedua negara. Selain konsensus yang gagal dalam meja negosiasi, ketidakstabilan politik domestik Indonesia yang pada saat itu mengalami masa pergantian presiden dan membuat *foreign policy* Indonesia berubah sesuai dengan jajaran kepresidenan yang baru, membuat tahapan perundingan ini mandek dan akhirnya dihentikan (Musyaffa, 2020).

Ketidaksepakatan Indonesia muncul karena besarnya *terms* yang diminta Korea Selatan tidak ideal dengan benefit yang didapatkan Indonesia, dimana Korea Selatan meminta eliminasi pos tarif sebesar 97.3% dalam sektor-sektor perdagangan pada produk krusial seperti bahan bakar mineral, minyak dan produk-produk mineral. Kemudian, ketidakseimbangan juga terlihat pada nilai ekspor dari total permintaan Indonesia sebesar 149,38 Juta USD dan nilai impor total permintaan Korea Selatan sebesar 734 Juta USD (Tiara, 2017, 92). Sementara itu, Korea Selatan menolak permintaan Indonesia untuk menjamin investasi di Indonesia dengan jumlah yang sudah ditentukan. Penolakan ini didasari oleh kebijakan domestik Korea Selatan yang tidak memiliki otoritas untuk mengatur preferensi investasi industri dalam negerinya (Safitri, 2021, 4).

Perbedaan persepsi kedua negara dalam memandang *terms* pada IK-CEPA inilah yang menjadi alasan penghentian sementara (*termination*) tahapan perundingan. Spesifikasi dalam kerangka kerjasama CEPA yang seharusnya merupakan *agreement* yang memiliki tingkatan lebih unggul dan dapat mengakomodasi kerjasama ekonomi dengan lebih baik—khususnya dalam bidang investasi—ini tidak tercapai. Ketidaksepakatan tersebut kemudian membuat CEPA terlihat tidak lebih menguntungkan daripada perjanjian lain yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang menunjukkan kontradiksi prospek perjanjian ini karena tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menjadikan CEPA sebagai perjanjian yang memiliki benefit dan intensitas yang jauh lebih menguntungkan dari jenis perjanjian lain (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Setelah sempat terhenti pada tahun 2014, Indonesia dan Korea Selatan kemudian secara resmi melakukan reaktivasi perundingan IK-CEPA pada 19 Februari 2019. Putaran perundingan pun dilanjutkan dimana putaran ke-8 dimulai kembali pada 30 April hingga 2 Mei 2019 yang kemudian mendapatkan konsensus oleh kedua negara

untuk meneruskan perundingan (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Reaktivasi perundingan IK-CEPA ini kemudian menimbulkan pertentangan dan pertanyaan, yaitu alasan Korea Selatan dan Indonesia yang masih bersedia untuk melanjutkan perundingan setelah sempat terhenti pada tahun-tahun sebelumnya. Berangkat dari anomali tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor kepentingan Indonesia dan Korea Selatan yang mendorong kedua negara tersebut untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA setelah sempat tertunda dan dianggap kurang menguntungkan, hingga mencapai kesepakatan dan pada akhirnya ditandatangani pada tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).” yang ditulis oleh Meyani Nindyvinta Safitri. Pada penelitiannya, Meyani menggunakan teori milik Ikenberry untuk mengidentifikasi tiga faktor pendorong reaktivasi perundingan IK-CEPA, yaitu *system-centered*, *state-centered*, *society-centered*. Dengan memfokuskan pada kepentingan nasional Indonesia, ia berargumen bahwa faktor dominan yang mendorong perundingan kembali IK-CEPA terletak pada tujuan percepatan liberalisasi ekonomi dan persaingan ekonomi dalam sistem internasional dalam faktor *system-centered*; hasil interaksi dan peran pemerintah dengan swasta pada faktor *state-centered*-nya; dan manifestasi dari suara *grassroots* yang diikutsertakan dalam pengambilan suara pada faktor *society-centered*-nya. Dalam penelitiannya, ia memfokuskan pada interaksi yang dilakukan Indonesia dalam prosesnya melanjutkan perundingan IK-CEPA.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana Meyani hanya menganalisis faktor-faktor reaktivasi dari sudut pandang Indonesia; sementara penelitian ini memfokuskan pada kepentingan

kedua negara yang terlibat dengan mengaplikasikan konsep *win-set* pada teori *Two Level Games* milik Robert Putnam. Komponen yang menjadi faktor pendorong reaktivasi perundingan ini tertuang dalam *win-set* yang kemudian saling *overlapping* dan memungkinkan lanjutnya perundingan IK-CEPA.

METODE PENELITIAN

Melalui jenis penelitian eksplanatif yang berupaya menjelaskan suatu permasalahan atau kejadian yang terjadi, fokus unit analisis penelitian ini adalah Korea Selatan dan Indonesia dengan *timeframe* tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari *press release*, laporan kementerian, dan sebagainya yang relevan dan diterbitkan oleh sumber resmi; serta data sekunder yang dikaji melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yang menganalisis dokumen-dokumen yang telah diterbitkan (Cresswell, 2017). Penelitian ini menerapkan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu pengumpulan & reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN ANALISIS

Indonesia—Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement

IK-CEPA diartikan sebagai suatu kerangka perjanjian kerjasama ekonomi dengan integrasi tertinggi antara Indonesia dan Korea Selatan yang secara spesifik mengatur mengenai perjanjian barang/jasa, investasi; pengaturan kelembagaan, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, penghapusan tarif, *trade remedies*, kekayaan intelektual, *e-commerce*, dan bidang lainnya yang lebih luas (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). CEPA diusung sebagai perwujudan kerangka kerjasama yang lebih tinggi daripada kerangka *Free Trade Agreement* yang sebelumnya telah ada dan dianggap mampu memfasilitasi perdagangan bebas dengan lebih efektif dengan mekanisme yang menargetkan pengurangan dan

penghapusan *tariff* pada lebih banyak produk barang, jasa, dan proteksi investasi yang lebih intens dan luas. Sebagai perbandingan, dalam skema *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang diikuti oleh negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, Korea Selatan hanya mengeliminasi 88% pos tarif sementara pada IK-CEPA mengeliminasi 95,54%, dan Indonesia berturut-turut mengeliminasi sebesar 91% dan 92,06% (Uly, 2020). Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kedalaman intensitas dan substansi komitmen perjanjian dalam kerangka IK-CEPA.

Dimulai pada tahun 2004, ide pembentukan IK-CEPA telah muncul dan direalisasikan dalam pembentukan *joint study group* yang bernama *Joint Task Force On Economic Cooperation* (JTF-EC) pada 2007 yang kemudian melakukan tiga kalipertemuan dan mengubah namanya menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM). Pada implementasinya, WLTFM merupakan sebuah forum kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh tingkat 1 Eselon dengan tujuan menghubungkan kedua negara untuk melakukan pertemuan rutin yang mendiskusikan kelanjutan kerjasama antar negara, dan pada kurun waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2015, forum ini telah melaksanakan 5 kali pertemuan yang membahas kelanjutan kerjasama tersebut (Wibisono, 2017). Dalam forum tersebut, ditemui bahwa terdapat banyak peluang menguntungkan bagi kedua negara melalui perjanjian bilateral yang mekanismenya lebih spesifik dengan *scope* yang lebih luas. Hal inilah yang mendasari lanjutnya inisiasi pembentukan IK-CEPA, kemudian dimulainya putaran perundingan IK-CEPA pada tahun 2012 (Safitri, 2021).

Putaran Pertama

Pada 12 Juli 2012, proses negosiasi perundingan IK-CEPA dimulai. Pada pertemuan ini membahas *Terms of Reference* (ToR) dan juga menyetujui perihal perdagangan barang, seperti aturan asal-usul, pajak dan bea cukai, fasilitas barang, perdagangan jasa, investasi, HAKI, pembangunan berkelanjutan dan kompetisi

(Safitri, 2021). Disepakati juga pembentukan *working group* yang kemudian terbagi kedalam beberapa bidang, yaitu Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanaan dan Fasilitasi Perdagangan, Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, serta Isu Hukum dan Kelembagaan (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Namun, pada putaran perundingan pertama yang dilakukan ini belum membuahkan hasil pada aspek *Trade Remedies and Cooperations*, yang didalamnya mencakup *capacity building* (Safitri, 2021).

Putaran ke-3

Pada putaran perundingan ketiga membahas *draft text* mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa (termasuk *financial service and telecommunication*) ROF, Prosedur bea dan cukai, fasilitas perdagangan, investasi, CCB, *E-Commerce*, *Government Procurement*, *Competition* dan *draft text* lainnya yang bersangkutan dengan isu-isu institusional dan legalitas (Safitri, 2021). Pertukaran *initial request* dan usulan *offering list* yang memuat rekomendasi produk-produk yang akan dikenakan pengurangan hambatan tarif ini kemudian menutup pedoman negosiasi perundingan pada tahap ini (Safitri, 2021).

Putaran ke-7

Pertemuan pada 21-28 Februari 2014 ini menyetujui pembahasan mengenai struktur dan keseluruhan *draft text* perjanjian IK-CEPA mengenai pembahasan *Chapter on Customs Procedure and Trade Facilitation* dan *Chapter on Competition*, *Chapter Trade in Service*, *Request Offer*, *Annexes (Financial, Movement of Natural Persons dan Telecommunication)*, dan *Cooperation and Capacity Building* hingga dapat dikatakan telah mencapai tahapan final (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.).

Pada perundingan ini, Korea Selatan menyetujui 15 bidang *Cooperation and Capacity Building* yang menjadi topik yang ditunda pada perundingan sebelumnya. 15

Bidang tersebut terdiri atas *Textile, Coal, Small Medium Industries, ICT, Machinery, Shipbuilding, Metal, Oil and Gas, Forestry, IPR, Government Procurement, Statistic, Certification and Standardization, Movement of Natural Persons* (Safitri, 2021). Walaupun begitu, pada tahapan perundingan ini, tetap ada beberapa hal yang belum dapat disepakati oleh kedua negara, khususnya disampaikan oleh Indonesia.

Hal-hal yang masih belum menemukan titik temunya dalam perundingan ini meliputi isu kebijakan dan peraturan perundangan perundang-undangan nasional kedua negara tersebut. Konsensus mengenai perdagangan barang dan tidak disetujuinya klausul investasi menjadikan topik ini sebagai *pending issues* (Safitri, 2021). Dalam perbincangannya, masing-masing delegasi dalam tim perundingan IK-CEPA telah menyepakati bahwa perjanjian IK-CEPA tidak akan mengubah peraturan perundang-undangan masing-masing negara, sehingga isu utama yang dihadapi dalam tahapan perundingan ini adalah belum tercapainya keseimbangan konsesi dalam bidang perdagangan barang (*Package Deal* akses pasar produk barang), investasi, dan peningkatan kapasitas (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.). Dalam hal ini, Indonesia menggagas bahwa Korea Selatan mestinya memberi jaminan investasi kepada Indonesia. Sementara itu, Korea Selatan hanya memberikan imbal balik yang sama dengan Indonesia yaitu pemangkasan tarif bea masuk. Indonesia menganggap bahwa *benefit* yang diberikan oleh Korea Selatan ini tidak terlalu menguntungkan bagi Indonesia karena produk lokal Indonesia belum dapat berkompetisi dalam pasar Korea Selatan. Oleh karena itu, Kemenperin mengharapkan Korea Selatan dapat membawa investasi ke sektor industri strategis melalui perjanjian IK-CEPA ini, seperti sektor elektronika, telekomunikasi, besi baja, dan petrokimia.

Penolakan Korea Selatan terhadap tuntutan Indonesia untuk memberi jaminan investasi tersebut membuat perundingan ini terhenti pada putaran ketujuh. Menurut Korea

Selatan, investasi merupakan *private sector commitment* dimana negara tidak memiliki kontrol atas kebijakan yang diambil, serta memahami bahwa perjanjian IK-CEPA telah disepakati untuk tidak mengubah perundang-undangan nasional negara masing-masing (Cholif, 2022). Oleh karena itu, putaran perundingan perjanjian IK-CEPA ini dihentikan. Selain itu, Kementerian Perindustrian menginginkan pertemuan pendahulu dengan pemerintah Korea Selatan sebelum perundingan ke-8 IK-CEPA dilakukan. Kondisi politik nasional Indonesia yang pada saat itu belum stabil akibat adanya pergantian kepresidenan yang membuat jajaran dan *outlook* misi Indonesia menjadi berubah juga berkontribusi sebagai salah satu alasan mengapa negosiator Indonesia tidak mempunyai kepastian dari kebijakan yang harus dilakukan seandainya perundingan masih dilanjutkan (Safitri, 2021).

Reaktivasi dan Lanjutnya Putaran Perundingan

Setelah menemui jalan buntu pasca tujuh putaran perundingan sepanjang 2012—2014, Indonesia dan Korea Selatan akhirnya menyepakati untuk meresmikan reaktivasi perjanjian pada 19 Februari 2019 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019) setelah merencanakan *preliminary meeting* di Seoul untuk membahas *ToR* kelanjutan perundingan pada 13 Februari (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.). Reaktivasi perjanjian ini merupakan hasil tindak lanjut dari Menteri Perdagangan RI dan Korea Selatan semenjak 13 November 2018, yang pada waktu itu membahas perencanaan reaktivasi IK-CEPA disela KTT ASEAN ke-33 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.). Kesepakatan ini menghasilkan kepastian mengenai kelanjutan putaran perundingan, dimana kemudian tahapan perundingan ke-8 berhasil terlaksana selama 4 hari dari tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 2019 di Seoul, Korea Selatan (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). Kemudian, pada Agustus 2019, putaran

perundingan ke-9 dilaksanakan di Jeju; lalu dilanjutkan pada perundingan ke-10 yang dilaksanakan di Bali pada 8—10 Oktober 2019 yang merupakan tahapan yang berhasil menuntaskan rangkaian perundingan IK-CEPA (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Tercapainya kesepakatan antara dua pihak ini menandai diresmikannya IK-CEPA. Pada 25 November di Busan, Korea Selatan, perwakilan masing-masing negara secara resmi menandatangani Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan IK-CEPA (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Proses peresmian IK-CEPA berlanjut hingga proses *legal scrubbing teks* perjanjian yang ditargetkan selesai pada Februari 2020 dan dapat meresmikan IK-CEPA pada semester pertama di tahun 2020 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Pada akhir pertemuan tersebut, delegasi masing-masing negara pada akhirnya mendapatkan konsensus untuk melanjutkan komitmennya dalam perjanjian ini, dimana masing-masing negara berjanji untuk memberikan *mutual benefit*. Indonesia dalam hal ini akan memberikan preferensi tarif kepada Korea Selatan untuk memfasilitasi dan membangun iklim investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar 0,96% pos tarif, bernilai 254,69% juta USD atau setara dengan 2,96% total impor Indonesia dari Korea Selatan. Dalam komitmennya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengatur permasalahan lahan dan lisensi, sehingga Korea Selatan hanya perlu “datang” membawa teknologi dan modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal, n.d.). Sebaliknya, Korea Selatan menjanjikan Indonesia untuk meningkatkan integrasi beberapa sektor jasa dan membuka lebih dari 100 subsektor yang mencakup sektor konstruksi, layanan pos dan kurir, *franchise*, hingga layanan terkait komputer. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga berkomitmen memfasilitasi pergerakan *intra-corporate transferees* (ICTs), *business visitors* (BVs), dan *independent professionals* (IPs)

(Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020).

Hasil analisis win-set kedua negara

a. Win-Set Korea Selatan

i. Level II — Preferences and Coalitions

Pada determinan ini, Korea Selatan memperlihatkan kecenderungan internasionalisnya. Hal ini dibuktikan dari interaksi Korea Selatan yang terbuka dalam pergaulan internasional, didukung dengan *nation branding*-nya yang memperlihatkan Korea Selatan sebagai negara liberalis yang mempromosikan kerjasama. Kecenderungan internasionalis ini semakin terlihat ketika Moon Jae-In terpilih menjadi Presiden Korea Selatan pada 2017. Terpilihnya Moon Jae-In ini berdampak besar pada kebijakan dalam dan luar negeri Korea Selatan. Dalam visi dan misi yang ia bawakan, khususnya pada bidang ekonomi, ia menjanjikan peningkatan *trade diplomacy* untuk melawan gerakan proteksionis global yang mulai muncul, serta meningkatkan bantuan pembangunan dan diplomasi publik ke seluruh dunia (The Korea Herald, 2017).

Melihat dinamika internasional yang terjadi pada masa pemerintahannya, Korea Selatan berupaya bernavigasi di tengah ketegangan yang berlangsung antara *partner* ekonomi terdekatnya, yaitu AS dan China. Hal tersebut mendorong Moon Jae-In untuk menginisiasikan kebijakan luar negeri yang bernama *New Southern Policy* (NSP). Kebijakan ini difokuskan untuk mempererat hubungan Korea Selatan dengan negara-negara Asia Tenggara (Pardo, 2022). Kebijakan ini kemudian dijalankan untuk mendorong negosiasi pembentukan FTA dengan negara-negara Asia Tenggara dan mengurangi dependensi Korea Selatan terhadap AS maupun China. Sejalan dengan *framework* jangka panjang *ASEAN–Korea Future-oriented Community*, pada November 2017, Moon Jae In secara langsung meluncurkan inisiatif *New Southern Policy* untuk mengadvokasikan “pengembalian fokus” ke Asia Tenggara, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kedekatan antara

Seoul dan Asia Tenggara dalam bidang strategis, sosial dan ekonomi (Milani, 2019, 171-172).

Sehingga, melalui preferensi aktor pemegang kepemimpinan Korea Selatan, terlihat bahwa Moon merupakan seseorang yang progresif dengan kecenderungan internasionalis. Dengan melakukan *pivot* ke Asia Tenggara, ia meresmikan “*balanced foreign policy*” setelah melihat kekhawatiran strategis jangka panjang di kepentingan regional dan komitmen/pengaruh Amerika Serikat. Karena itu, NSP hadir sebagai remedi dari over-dependensi ekonomi Korea Selatan ke China dan *traditional reliance* ke Amerika Serikat yang merupakan *pivotal security provider* Korea Selatan (Milani, 2019, 172).

ii. Level II — Political Institutions

Pada runtutan tahapan pembuatan hingga persetujuan *treaty* di Korea Selatan, dalam memperoleh ratifikasi domestik, sebuah *treaty* memerlukan pertimbangan dari banyak pihak, khususnya dalam persetujuan akhir yang memerlukan suara atau *consent* penuh dari Majelis Nasional. Majelis Nasional memperhatikan aktor-aktor yang akan berdampak pada perjanjian tersebut, termasuk masyarakat umum hingga pelaku bisnis. Aktor non-negara seperti *chaebols* dan pemilik usaha lainnya memiliki suara yang penting untuk dipertimbangkan oleh Majelis Nasional dalam membuat keputusan domestik, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan, mengingat bahwa *chaebols* memiliki dominasi dan pengaruh yang kuat dalam perekonomian Korea Selatan (Chang, 2019). Hal ini karena *Market power* Korea Selatan memiliki ketergantungan dan dikonsentrasikan pada *chaebols*, sampai pada titik dimana pemerintah harus mendukung entitas-entitas ini—khususnya saat mengalami krisis keuangan—karena ketika *chaebols* mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat maupun stagnan, banyak segmen besar ekonomi Korea Selatan akan ikut terdampak (Investopedia & Kenton, 2021). Samsung, sebagai salah satu perusahaan teknologi yang dimiliki oleh *chaebol*, telah memiliki aset sebesar 42% dari GDP Korea

Selatan (Premack, 2017, 5). Dimana pada 2019, Samsung membukukan pendapatannya sebesar lebih dari 314 triliun won, dan mewakili 19,4% dari GDP Korea Selatan (Hankyoreh, 2020). Melihat kontribusi besar perusahaan tersebut dalam mendukung ekonomi nasional, Korea Selatan telah mengikuti banyak *trade agreements* untuk memudahkan transaksi perdagangannya.

Dalam konteks berlanjutnya IK-CEPA, keputusan politis dari dalam institusi terlihat dari bagaimana negara berusaha mendukung perusahaan swasta untuk tetap maju dengan melanjutkan dan meratifikasi IK-CEPA. Dalam hal ini interaksi domestik yang terjadi antara Moon Jae In sebagai pemerintah, institusi negara dan aktor pengusaha terlihat, dimana IK-CEPA akan sangat memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai, LG, dan lain-lain untuk melebarkan sayap di Asia Tenggara dan membukakan pintu perdagangan yang lebih luas lagi, bahkan membuat base di Indonesia, yang merupakan salah satu keunggulan utama dalam adanya perjanjian ini.

iii. Level I — *Negotiator's Strategy*

New Southern Policy yang dibawakan oleh administrasi Moon Jae-In dan menjadi “kiblat” kebijakan luar negeri Korea Selatan sangat mempengaruhi *win-set* dan *standing position* sang negosiator. Dengan adanya NSP, pemerintah Korea Selatan mengambil kontrol dalam memudahkan dan memajukan perdagangan Korea Selatan, dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (IFRI Center for Asian Studies, 2021, 23). Perwujudan dari niat atau strategi inilah yang menjadi landasan dasar negosiator dalam memperjuangkan keberlanjutan IK-CEPA.

Pada 2014, beberapa faktor utama gagalnya kelanjutan perundingan IK-CEPA terletak pada kurangnya kesepakatan antar kedua negara sehingga konsensus tidak tercapai dan akhirnya perundingan ini dihentikan sementara. Korea Selatan tidak menyepakati beberapa demand yang diajukan Indonesia, khususnya pada pertimbangan

investasi. *Deadlock* yang terjadi pada bidang investasi ini membuat Korea Selatan menunjukkan terjadinya *involuntary defecation* dalam proses negosiasi, yaitu fenomena dimana negosiator menyetujui kesepakatan yang ditawarkan dalam meja internasional meskipun gagal dalam memperoleh ratifikasi dalam negerinya (Putnam, 1988, 453), dalam hal ini, negosiator menyetujui kelanjutan IK-CEPA meskipun belum dapat memastikan jaminan investasi yang diajukan oleh Indonesia.

Synergistic issue linkages dan resiko yang diambil oleh negosiator untuk melanjutkan IK-CEPA ini dinilai lebih menguntungkan daripada harus menolak atau menjatuhkan kesepakatan IK-CEPA yang memiliki lebih banyak potensi untuk menguntungkan dan memenuhi kepentingan Korea Selatan; khususnya kepentingannya untuk membangun *stable post* produksi dan penjualan di wilayah Asia Tenggara. Ditambah, kepentingan Korea Selatan dalam sektor-sektor jasa seperti infrastruktur, transportasi maritim, konstruksi, telekomunikasi, distribusi, dan jasa keuangan telah bersinergi dengan Indonesia (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Keyakinan yang dibawa oleh negosiator sebagai *bargaining positionnya* dalam meja perundingan didukung oleh data bahwa iklim investasi di Indonesia memungkinkan untuk Korea Selatan. BKPM Indonesia telah mencatat bahwa sejak 2015, Korea Selatan telah menjadi investor *foreign direct investment* terbesar di Indonesia, dengan total investasi sebesar USD 7.7 billion (Badan Koordinasi Penanaman Modal, n.d.). Sehingga, dalam ketiga faktor determinan *win-set* ini, dapat dikatakan bahwa Korea Selatan memiliki *win-set* yang besar.

b. Win-Set Indonesia

i. Level II — *Preferences and Coalitions*

Dalam kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, “*international engagement*” untuk mendorong peran Indonesia dalam level global dan regional menjadi prioritas

kebijakan luar negeri Indonesia (Andika, 2016, 3). Diplomasi “*a million friends, zero enemy*” pada masa ini menitikberatkan pada presensi Indonesia yang asertif di kawasan regional (Andika, 2016, 3). Sehingga, preferensi Indonesia kala itu menunjukkan kecenderungan internasionalis dalam hubungan luar negerinya. Hal tersebut mendorong inisiasi dan negosiasi pembentukan IK-CEPA pada tahun 2012 (Wibisono, 2016).

Tidak tercapainya konsensus dalam perundingan dan terjadinya *political shift* di Indonesia pasca pergantian presiden akhirnya menyebabkan perundingan IK-CEPA dihentikan. Perbedaan yang signifikan dalam fokus hubungan luar negeri pada era SBY dan periode pertama Joko Widodo ada pada konsentrasi *affair*-nya. Pada periode ini, Joko Widodo mengusung “*Pro-people Diplomacy*” yang lebih *inward-looking* dan fokus pada optimalisasi aktivitas diplomatik yang harus mengarah pada keuntungan ekonomi domestik (Andika, 2016).

Barulah pada periode kedua, preferensi internasionalis Joko Widodo tertuang dalam programnya yang bernama “Nawa Cita Chapter II” (Kementerian Komunikasi dan Informatika, n.d.). Salah satu isinya adalah menargetkan Kementerian Industri untuk dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.4-6%. Strategi yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah menguatkan iklim investasi, berpartisipasi dalam open trade, dan meningkatkan keterlibatan dalam jaringan produksi global, meningkatkan diplomasi ekonomi dan memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas, mengoptimalkan potensi sumber pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya meningkatkan sektor manufaktur. Hal itulah mendorong Indonesia untuk semakin gencar melanjutkan dan menciptakan perjanjian perdagangan bebas serta perjanjian ekonomi lainnya untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

ii. Level II — *Political Institutions*

Pada interaksi institusi dalam lembaga eksekutif, khususnya dalam Kementerian

Luar Negeri, penguatan diplomasi ekonomi menjadi prioritas Sub Bidang Politik Luar Negeri pada tahun 2015-2019 yang difokuskan untuk mendukung perdagangan dan pembukaan pasar yang prospektif, salah satu strateginya adalah penghapusan *non-tariff barrier* dan melakukan kerjasama dengan kawasan yang memiliki pertumbuhan yang pesat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Pada tingkat eksekutif, Kementerian membuat *think-tank* atau *forum group studies* yang menganalisis suatu kebijakan sebelum disetujui. Mulai dari 2011, IK-CEPA telah dianalisis dengan proyeksi keberhasilan yang besar. Walaupun demikian, terdapat *conflicting interest* yang saling bersinggungan dalam perundingan ini, dimana Menteri Perindustrian M.S. Hidayat sempat mendesak agar perundingan itu ditunda saja. Ia menilai bahwa permintaan Korea Selatan dalam negosiasinya tidak sebanding dengan keuntungan Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, n.d.). Oleh karena itu, kesepakatan kerjasama IK-CEPA pada 2014 ini gagal dilanjutkan.

Namun, dalam kabinet baru Joko Widodo yang dibentuk pada 2019 bernama “Kabinet Indonesia Maju” (Presiden RI, 2018) terdapat 9 misi baru yang berisikan *goals* dan program yang didasarkan dari Nawa Cita 2014 (The Jakarta Post, 2018). Ketiga instrumen institusi ini yaitu Nawa Cita dan kabinetnya bergerak sesuai pencapaiannya masing-masing (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2017, 13). Terlihat dari masalah domestik yang ditemukan, jajaran institusi yang sinergis ini mendapati bahwa IK-CEPA dibutuhkan sebagai salah satu cara meningkatkan ekonomi dan perdagangan yang berlandaskan *mutual cooperation*. Sehingga, dalam hal ini, keputusan untuk melanjutkan IK-CEPA paralel dengan ‘kiblat’ institusi Indonesia. Dengan jajaran dan *goals* baru, lahirlah *compromise* baru dengan memperhatikan *synergistic issue linkages* yang timbul pada IK-CEPA. Hal inilah yang mendorong tercapainya konsensus pada 13 November 2018 antara Menteri Perdagangan RI dan

Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan di sela KTT ASEAN ke-33. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.).

iii. Level I — Negotiators' Strategy

Trade-off atau dinamika dalam proses negosiasi level II Indonesia terjadi pada ketidaksetujuan dari salah satu kementerian Indonesia yang tidak melihat keseimbangan dalam perjanjian ini. Poin ini memungkinkan negosiator untuk membawa win-set atau kerangka kepentingan yang masih diperlukan oleh Indonesia ke meja perundingan, yaitu dengan menjanjikan keterkaitan isu yang sinergis (dan tetap menguntungkan) ke konstituen domestiknya (Putnam, 1988).

Poin utama dalam penolakan beberapa aktor domestik di Indonesia adalah tidak adanya jaminan investasi yang dapat dijanjikan dalam IK-CEPA, *involuntary defecation* kembali terjadi di pihak Indonesia; dimana negosiator berupaya untuk 'mengorbankan' satu sektor yang dituntut domestik, demi keberlangsungan perjanjian yang menguntungkan banyak sektor lainnya. Negosiator memunculkan *compromise* dan berhasil meyakinkan konstituen domestik bahwa perjanjian ini akan lebih menguntungkan daripada harus menunda/menghentikannya.

Bargaining position yang dimiliki Indonesia pun paralel dengan kebutuhan Korea Selatan, yang membuat Korea Selatan pun bersikukuh untuk melanjutkan perjanjian ini. Pada upaya meningkatkan struktur industri, Korea akan memindahkan *production facility*-nya ke luar negeri, dan Indonesia menjadi tempat utama yang strategis bagi perusahaan-perusahaan Koreaini untuk pindah (ASEAN-Korea Centre, 2017). Hal ini didukung fakta bahwa sektor manufaktur Indonesia memiliki kontribusi yang besar, dimana pada *first quarter* 2019 menunjukkan angka 22,7% dari total investasi senilai 195.1 triliun rupiah, hampir setara dengan Jerman yang memiliki 20,6% kontribusi pada GDP-nya sehingga diprediksi bahwa Indonesia merupakan *manufacturing hub* terbesar di ASEAN (*Office of Assistant to*

Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, n.d.).

Faktor determinan strategi negosiator pada win-set Indonesia ini menjadi kuat dengan adanya *bargaining position* dan *synergistic issue linkages* yang rasional. Indonesia memiliki *natural resources* dan *labor* yang memiliki banyak potensi akselerasi pada bidang manufaktur dan jasa, serta memiliki potensial besar dalam pasar domestiknya (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Hal ini dapat dimudahkan dengan adanya IK-CEPA. Melihat data BPS pada 2018, Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan ekspor dan sumber impor terbesar Indonesia yang nilai perdagangannya mencapai 18,62 juta USD. Dari ekspor Indonesia ke Korea Selatan, senilai USD 9,54 M USD, sementara impor Indonesia dari Korea Selatan adalah sebesar USD 9,54 M yang menjadikan Indonesia surplus perdagangan sebesar 460 juta USD (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Negosiator dapat meyakinkan bahwa IK-CEPA akan menguntungkan karena Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas pada produk industri, perikanan, dan pertanian di Korea Selatan. Sementara itu, pada akses pasar sektor jasa, Korea Selatan akan menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga ahli Indonesia.

Dari tahun 2015 hingga 2019, Korea Selatan telah menginvestasikan 6,9B USD ke dalam 12,992 proyek di Indonesia, dan pada tahun 2020, Korea Selatan menginvestasikan 1B USD yang menjadikannya sebagai nilai investasi terbesar ketujuh bagi Indonesia (Musyaffa, 2020). Kesepakatan IK-CEPA juga dapat menjadi komitmen Korea untuk mendukung perkembangan industri berbasis *high-tech* di Indonesia, yaitu dengan memfasilitasi pertukaran informasi di bidang sains dan teknologi, *software*, dan robotik (Musyaffa, 2020). Selain itu, IK-CEPA akan membantu Indonesia menjadi *production hub* (khususnya dalam wilayah Asia) dan membuat ekonomi domestik semakin kuat dan kompetitif. Menurut DirJen. Perundingan

Perdagangan Internasional Indonesia, IK-CEPA diprediksikan dapat meningkatkan perdagangan bilateral hingga US\$30 miliar pada tahun 2022 (HKTDC Research, 2019).

Kementerian Korea Selatan telah membuat *framework cooperation* yang akan memperkuat hubungan mereka dalam bidang pengembangan industri, energi, budaya, infrastruktur, dan kesehatan. Salah satu proyek investasi yang telah melewati studi pendahuluan adalah pabrik baterai terintegrasi di Indonesia, yaitu perusahaan LG Chem (Nikkei Asia, 2019). Dari hal tersebut, terlihat bahwa walaupun tidak dapat memberikan jaminan dalam perjanjian IK-CEPA, Korea Selatan telah menunjukkan komitmennya. Dalam hal ini, kesiapan dan iklim investasi Indonesia-lah yang menjadi penentu suksesnya investasi tersebut.

Pada putaran IK-CEPA yang ke-8, dialog bisnis juga sudah terjadi antara Ketua Tim Perunding Indonesia dan pelaku usaha Korea Selatan, beberapa diantaranya adalah *Hyundai Motors, Korea Food Industry, Lotte Chemical, Buhmwoo Chemical, SinSin Pharmaceutical, and Korea Ginseng Corporation*. Pembahasannya meliputi masukan dari pihak swasta Korea Selatan dalam upayanya meningkatkan investasi, perdagangan, dan juga kerjasama. Pada tahun 2019, Menteri Perdagangan Indonesia berlangungnya IK-CEPA akan melancarkan investasi perusahaan-perusahaan besar asal Korea Selatan di Indonesia, salah satunya *Hyundai Motors* yang diprediksi akan berinvestasi hingga 1M USD, dan *Lotte* yang akan berinvestasi sebesar 3M USD untuk mengembangkan pabrik petrokimia-nya (Safitri, 2021). Sebagai timbal baliknya, Indonesia menyiapkan diri untuk investasi dan berkomitmen untuk memfasilitasi investor Korea Selatan untuk masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, Korea Selatan hanya butuh datang dengan modal dan teknologi-nya, sementara perihal dan permasalahan lahan dan lisensi akan sepenuhnya diurus oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan akses investasi bagi Korea.

Pada akhirnya, strategi yang diambil oleh negosiator Indonesia telah mampu

meyakinkan konstituen domestiknya dengan memberikan suatu tawaran yang dapat menjadi solusi 'kurangnya' keuntungan yang akan didapat Indonesia melalui IK-CEPA. *Standing position* yang dimiliki Indonesia juga terlihat kuat disini, yang membuat *bargaining position* Indonesia juga kuat. Namun, *compromise* terjadi disini, seperti yang diprediksi Putnam dalam teorinya, bahwa dalam setiap proses negosiasi, pasti terjadi 'uncertainty', atau sebuah celah bagi negosiator untuk menekankan pentingnya kesepakatan dengan harus berkompromi daripada kesepakatannya tidak terjadi sama sekali. (Putnam, 1988, 453)

KESIMPULAN

Konsep *win-set* pada teori *Two Level Games* didefinisikan sebagai suatu rangkaian kebijakan rasional yang dibawa oleh negosiator yang cenderung akan memperoleh ratifikasi pada level domestiknya, ditentukan oleh preferensi dan *bargaining power* para komponen domestik. Faktor determinandalam *win-set* ini *benchmark* apakah kepentingan domestik dan internasional kedua negara tersebut dapat dipenuhi dalam perjanjian yang akan dinegosiasikan oleh negosiator. Peluang disepakatinya suatu perjanjian semakin meningkat jika *win-set* kedua negara tersebut saling *overlapping*, dimana besaran *win-set*-nya, mencerminkan kemungkinan yang sama besarnya untuk *overlapping* (Blankshain, 2020). Kesamaan kepentingan yang ingin diraih kedua negara dalam masing-masing *win-set* yang *paralel* ditemui dalam skema *win-set* yang memiliki *overlapping* besar. Dari pernyataan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menemukan *overlapping* yang besar pada skema *win-set* Indonesia dan Korea Selatan pada 2019.

Win-set kedua negara pada Level II *Preferences and Coalitions* menunjukkan *overlapping* yang besar, ditandai dengan kesamaan kecenderungan internasionalis yang terlihat dalam preferensi kedua negara dan koalisi di dalamnya. Kesimpulan ini didapatkan setelah menganalisis *background*

serta visi-misi yang dibawakan oleh kedua kepala negara beserta kabinet yang menjadi koalisinya.

Dalam determinan Level II *Political Institution*, ditemui bahwa kedua negara memiliki proses pengambilan keputusan yang demokratis dengan mempertimbangkan aktor *key interest* domestiknya. Dinamika dan interaksi antar institusi masing-masing negara membahas mengenai potensi perhitungan keuntungan dan kemungkinan lanjutnya kesepakatan IK-CEPA. *Win-set* keduanya menunjukkan skema yang besar, dengan tendensi kecenderungan lebih besar pada Korea Selatan, sedangkan Indonesia menghadapi *clash* atau perbedaan pendapat dalam institusi politiknya. Namun begitu, Indonesia akhirnya dapat berkompromi setelah mempertimbangkan *synergistic issue linkages* yang akan terjadi. Hasil identifikasi interaksi antar institusi dan dinamika pengambilan keputusan yang terjadi pada level ini kemudian memperlihatkan besaran *win-set* masing-masing negara.

Strategi negosiator Indonesia dan Korea Selatan yang ditunjukkan pada Level I *Negotiator Strategy* memperlihatkan upayanya untuk mempertahankan perundingan ini dengan pertimbangan bahwa perjanjian ini akan menguntungkan dan sejalan dengan kiblat kebijakan luar negeri masing-masing negara. *Involuntary defection* nampak pada dinamika level ini, dimana negosiator memperoleh *insight* untuk meyakinkan pihak domestiknya bahwa perjanjian ini akan lebih menguntungkan jika berlanjut daripada harus menghapuskannya setelah terjadinya *trade off*. Keberhasilan strategi negosiator untuk meyakinkan konstituen domestiknya ini kemudian memperbesar *win-set* kedua negara.

Dengan mengaplikasikan konsep *Two Level Games* dan mengidentifikasi komponen analisis faktor determinan dalam skema *win-set*, hasil analisis antara *win-set* Korea Selatan dan Indonesia menunjukkan adanya *overlapping* yang besar. Analisis tersebut kemudian menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendasari Indonesia dan Korea Selatan melakukan reaktivasi perundingan

Indonesia—Korea Selatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN-Korea Centre. PARTNERING FOR TOMORROW: ASEAN-Korea Relations. Seoul: ASEAN-Korea Centre, 2017.
- Chang, Kyung-Sup. Developmental Liberalism in South Korea: Formation, Degeneration, and Transnationalization. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.
- Cresswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications, 2017.
- Milani, Marco. dkk. The Korean Paradox: Domestic Political Divide and Foreign Policy in South Korea, Edited by Marco Milani, Antonio Fiori, and Matteo Dian. Politics in Asia Series. New York: Routledge, 2019.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications, 1994.
- Andika, Muhammad Tri. "An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy." Indonesian Perspective Journal, (2016).
- Cholif, Ulim Maidatul. "South Korea's Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia." Skripsi, (2022).
- IFRI Center for Asian Studies. "The Economic Pillar of Korea's New Southern Policy: Building on Existing Assets." (2021), https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nicolas_economic_pillar_korea_2021.pdf
- Iida, Keisuke. "Involuntary Defection In Two-Level Games." Kluwer Academic Publisher, (1996).
- Ismail, Achmad., Darynaufal Mulyaman, "Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership

- Agreement (IK-CEPA)." Jurnal ISIP, (2018).
- Lestari, Mia. "Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Pengungkapan Islamic Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating." Skripsi, (2020).
- Putnam, Robert D. "Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games." International Organization, Cambridge Journals, (1988).
- Rimasari, Ika Septiana. "Analisis penundaan penandatanganan GSOMIA antara Korsel dengan Jepang pada masa pemerintahan Lee Myung Bak 2008-2012." Skripsi, (2017).
- Safitri, Meyani Nindyvinta. "Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)." Skripsi, (2021).
- Tiara, Ayu Caesar. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terhentinya Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) di Tahun 2014." Skripsi, (2017).
- Premack, Rachel. "South Korea's Conglomerates." (SAGE Business Researcher Publishing: 2017), <https://scholar.harvard.edu/files/frankel/files/skorea-conglomerates2017sage.pdf>
- Wibisono, Belita Ayu Silviana. "Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia Korea Selatan Dalam Kerjasama Working Level Task Force Meeting (WLTFM)." Skripsi, (2016). [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/2.%201302045100%20-%20Belita%20Ayu%20Silviana%20W%20\(11-09-17-02-44-08\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/2.%201302045100%20-%20Belita%20Ayu%20Silviana%20W%20(11-09-17-02-44-08).pdf)
- Musyaffa, Iqbal. "Indonesia, South Korea ink economic cooperation deal." AA.com, 18 Desember 2020, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-south-korea-ink-economic-cooperation-deal/2081529>
- Uly, Yohana Artha. "Ini Keuntungan IK-CEPA bagi Indonesia." Kompas.com, 18 Desember 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/12/18/151010726/ini-keuntungan-ik-cepa-bagi-indonesia?page=all>
- The Korea Herald, "What Moon Jae-in pledged to do as president," 10 Mei 2017, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170509000521>
- The Jakarta Post, "Here are Jokowi-Ma'ruf's nine 'missions' for 2019's presidential poll," 5 Desember 2018, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/04/here-are-jokowi-marufs-nine-missions-for-2019s-presidential-poll.html>
- Hankyoreh, "S. Korean chaebols comprise 84% of GDP but only 10% of jobs," 14 Juni 2020, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/949236.html
- Nikkei Asia, "South Korea and Indonesia reach final agreement on free trade deal," 25 November 2019, <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-Korea-and-Indonesia-reach-final-agreement-on-free-trade-deal>
- Pardo, Ramon Pacheco. "The Moon Jae-in presidency: key foreign policy legacies."
- Kenton, Will. "Chaebol Structure." Investopedia, 27 Agustus 2021, <https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp>
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. "Understanding Policymaking In Indonesia: In Search Of A Policy Cycle." Juni 2017, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Understanding-Policy-Making-in-Indonesia-PSHK.pdf>
- HKTDC Research. "INDONESIA: Negotiations Concluded on South Korea Free Trade Agreement." 4 November

2019,

<https://research.hktdc.com/en/article/Mjk2NTYzNzY1>

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Indonesia–Korea CEPA: Tonggak Baru Hubungan Ekonomi Bilateral Kedua Negara, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesiakorea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Joint Study Group Report: Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190329_joint-study-group-report-indonesia-korea-cepa.pdf

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan IK-CEPA: Langkah Pasti Menuju Penandatanganan Perjanjian, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/deklarasi-bersama-penyelesaian-perundingan-ik-cepa-langkah-pasti-menuju-penandatanganan-perjanjian>

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Kembali Dimulai, Perundingan IK-CEPA Ditargetkan Selesai pada 2019, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/kembali-dimulai-perundingan-ik-cepa-ditargetkan-selesai-pada-2019>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Infografis: Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat,

<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>

Presiden RI. Kabinet Indonesia Maju, <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Press Release: Pursuing Investments to South Korea, the Indonesian Government Ensures New Player in Downstream Industry, https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/1_Pursuing_Investments_to_South_Korea%2C_the_Indonesian_Government_Ensures_New_Player_in_Downstream_Industry.docx_.pdf

Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. Indonesia Poised to Become Manufacturing Hub in ASEAN,

<https://setkab.go.id/en/indonesia-poised-to-become-manufacturing-hub-in-asean/>

Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. Bilateral Treaty-Making Process,

https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5439/contents.do#part4

Blankshain, Jessica. “Two-Level Games,” Youtube, diunggah oleh Jessica Blankshain, Naval War College, 22 Agustus 2020, <https://youtu.be/S3mold--yEA>